



ANALISIS PERENCANAAN DAN EVALUASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Parinem¹, Karningsih²

UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia

email: parinem2002@gmail.com¹, karningsih@untagsmg.ac.id²

Abstrak

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Kata kunci : perencanaan, evaluasi, pemerintah

Abstract

The performance achieved by an organization is basically the achievement of the members of the organization itself, from the top to the bottom level. The concept of local government performance itself emerged when government institutions began to try to introduce new concepts in the management of public affairs into *good governance*. A successful organization is an organization that has a clear and measurable vision and mission. This means that the vision and mission will not be meaningful if they are not actualized in organizational performance within the framework of creating *good governance*.

In an effort to achieve good organizational performance, a good, directed and comprehensive work plan is needed, so that it is easy for management to control the operational activities of the organization. The output is presented in a budget prepared by management based on targets that are tailored to the conditions and needs of the organization, the period of which is one year, or the period is more than one year, and is prepared in a certain format (Salbiah and Rizky, 2012).

Keywords: planning, evaluation, government

1. PENDAHULUAN

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Riyadi & Bratakusamah (2004: 8).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud Perencanaan dan Evaluasi Program
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam perencanaan dan evaluasi program dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengenali apa itu perencanaan dan Evaluasi Program
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapai dalam perencanaan dan Evaluasi Program meningkatkan kinerja pemerintah daerah

II METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian dengan menggunakan diskripsi berupa kalimat atau penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. (Soerjono Soekanto, Sosiologi SMA (Jakarta: Erlangga, 2014, hlm 22)). Metode Pengumpulan data yang kami

gunakan adalah metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dimana si peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan (Muin, Idianto. 2014. Sosiologi SMA. Jakarta; Erlangga).

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perencanaan dan Evaluasi Program

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan Untuk mendefinisikan evaluasi program, perlu didefinisikan bagian-bagian komponennya. Dalam konteks pendidikan, sebuah program dapat dianggap sebagai usaha pendidikan yang ditujukan untuk solusi dari masalah pendidikan tertentu atau perbaikan beberapa aspek dari sistem pendidikan. Misalnya program biasanya akan disponsori oleh publik atau swasta dana, memiliki tujuan tertentu, dan menunjukkan beberapa struktur untuk mengelola prosedur, bahan, fasilitas, dan/atau personel yang terlibat dalam program

Evaluasi dapat didefinisikan paling sederhana sebagai penentuan nilai sesuatu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, Oleh karena itu, evaluasi program terdiri dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk menilai nilai atau kegunaan suatu program (atau program alternatif) dalam meningkatkan beberapa aspek tertentu dari sebuah sistem pendidikan. Contoh evaluasi program mungkin termasuk evaluasi pendidikan bilingual nasional program, program preservice universitas untuk melatih administrator larangan Anda, program pengembangan staf kementerian pendidikan, atau pusat sumber daya pendidikan orang tua setempat. Evaluasi dapat dilakukan untuk program dengan berbagai ukuran atau ruang lingkup, mulai dari program aritmatika tertentu sekolah ke konsorsium internasional tentang pendidikan metrik

Analisis kendala yang di hadapai dalam perencanaan dan Evaluasi Program meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Adapun penanggung-jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain.

➤ Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan.

➤ Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya

➤ Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan

IV SIMPULAN

Pimpinan perlu memberikan dorongan kepada agar lebih disiplin dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, sehingga data yang diperoleh dalam evaluasi kinerja dapat menunjukkan kondisi pelaksanaan anggaran paling akhir. Di samping pegawai pelaksana kegiatan juga perlu lebih intensif menjalin komunikasi dengan pihak eksternal yang menjadi sumber kendala, sehingga titik temu untuk menyelesaikan kendala dapat segera diperoleh

V DAFTAR PUSTAKA

- Worthen, B. (1990). *Program evaluation*. H. Walberg & G. Haertel (Eds.), *The international encyclopedia of educational evaluation* (pp. 42-47). Toronto, ON: Pergamon Press.
- WestminsterResearch <http://www.westminster.ac.uk/westminsterresearch> Rajeev H. Dehejia (1999) *PROGRAM EVALUATION AS A DECISION PROBLEM*
Carter Mc Namara (2002) *A Basic Guide to Program Evaluation*
- Ellen Taylor Powell (1996) *Planning a Program Evaluation*
- Teuku Rully (2019) *Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil*
- Sem Gagah, Rianto (2022) *EFEKTIVITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DANA DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- NUR ROHMAH, SITI (2022) *INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH*
- YUNIA, META (2022) *KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG*
- Heru Pratama (2016) *Pengaruh Kompetensi, Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Kelompok Kerja Pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*
- Ita Friyanti (2016) *FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL APARAT PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH INDRAMAYU)*
- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur (2015) *PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*

Mujianto, H., Nurhadi, Z., & Ramadhantie, A. (2020). *STRATEGI HUMAS Humas Online DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. PRecious: Public Relations*

Ikeu Hikmawati (2022) *STRATEGI HUMAS ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*